



**BIRO ORGANISASI  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# **LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

***BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN***



[biroorb@bantenprov.go.id](mailto:biroorb@bantenprov.go.id)



[biroorganisasidanrb.bantenprov.go.id](http://biroorganisasidanrb.bantenprov.go.id)



[@organisasi\\_reformasibirokrasi](https://www.instagram.com/organisasi_reformasibirokrasi)



[Biroorganisasi Dan Reformasibirokrasi](https://www.facebook.com/BiroorganisasiDanReformasibirokrasi)



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Telp. (0254) 200123, Palima-Serang

### NOTA DINAS

Kepada : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten  
Dari : Plt.Kepala Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi Banten  
Nomor : 800/26-ORB/2024  
Tanggal : 18 Januari 2024  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Perihal : Laporan Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2023

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Ibu Pj. Sekretaris Daerah Laporan Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi T.A 2023 sebagai berikut:

1. Laporan Capaian Sasaran Strategis Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi T.A 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .
2. Laporan Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi T.A 2023.
3. Laporan Capaian Target Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang terdiri atas:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
  - b. Program Penataan Organisasi, meliputi:
    - 1) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meliputi:
      - a) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
      - b) Fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota;
      - c) Penataan analisis Jabatan.
    - 2) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, meliputi:
      - a) Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
      - b) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
      - c) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
      - d) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan;
      - e) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.
    - 3) Masalah dan Kendala.

Demikian kami sampaikan, mohon koreksi dan arahan lebih lanjut atas perhatian dan arahan Ibu diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN  
REFORMASI BIROKRASI,

  
AKHMAD THAMRIN,ST.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19680725 199703 1 005

LAMPIRAN I  
NOTA DINAS Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN  
REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR. : 800/26-ORB/2024  
TANGGAL: 18 Januari 2024

LAPORAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI T.A 2023  
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	80.25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 80.25 dengan kategori A (memuaskan) yang diperoleh dari Penilaian pemenuhan kriteria terhadap (empat) komponen dan 12 sub Komponen (LHE AKIP Setda Tahun 2022 oleh Inspektorat).
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84.2	Struktur dan Proses Organisasi Pemerintah Provinsi Banten dinilai sangat efektif dan mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal (Laporan Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemprov Banten Tahun 2023 oleh Tim dari Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitass Sultan Ageng Tirtayasa).
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91.16	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Nilai Akhir dan Zona 91.16 kategori A, dengan Opini Kualitas Tertinggi (Keputusan Ombudsman Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023).
4	Meningkatnya nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10.24	Hasil evaluasi Kementerian PAN RB berdasarkan Suratnya Nomor: B/400/AA.05/2023, tanggal 27 November 2023, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

LAMPIRAN II  
NOTA DINAS Plt. KEPALA BIRO  
ORGANISASI DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR. : 800/26-ORB/2024  
TANGGAL: 18 Januari 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI  
BIROKRASI T.A 2023

PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

SESUAI SURAT EDARAN Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 910/3095-BPKAD/2023 Tanggal 12 September 2023

PAGU MURNI	3.464.817.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	609.268.000
PAGU PERUBAHAN	2.773.092.000	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.163.824.000
BERTAMBAH/ BERKURANG	(691.725.000)	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	2.773.092.000

STRUKTUR ANGGARAN PERUBAHAN PADA BIRO ORGANISASI DAN RB  
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
Rp. 609.268.000	Rp. 2.163.824.000
Rp. 2.773.092.000	

REALISASI ANGGARAN	
PAGU ANGGARAN	2.773.092.000
REALISASI ANGARAN	2.429.102.103
SISA ANGGARAN	343,989,897
RENCANA FISIK	100
REALISASI FISIK	95.95
REALISASI KEUANGAN	87,60

LAMPIRAN III  
NOTA DINAS Plt. KEPALA BIRO  
ORGANISASI DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR : 800/26-ORB/2024  
TANGGAL: 18 Januari 2024

LAPORAN CAPAIAN TARGET KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PROGRAM  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perovinsi Banten

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	(%)
			(Rp.)	(Rp.)	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>609.268.000</b>	<b>572.696.862</b>	<b>36.571.138</b>	94,00
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.650.000</b>	<b>9.239.241</b>	<b>1.410.759</b>	86,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	899.100	900	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.980.000	2.980.000	0	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.980.000	1.594.000	1.386.000	53,49
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000	449.550	450	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.540.000	1.538.361	1.639	99,89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	899.100	900	99,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	879.130	20.870	97,68

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	(%)
			(Rp.)	(Rp.)	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.496.400</b>	<b>3.600</b>	99,92
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900.000	900.000	0	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000	899.100	900	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	900.000	899.100	900	99,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	900.000	899.100	900	99,90
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	900.000	899.100	900	99,90

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	(%)
			(Rp.)	(Rp.)	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.076.000	85.071.814	10.004.186	89,48
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.300.000	2.500.000	1.800.000	58,14
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.776.000	82.571.814	8.204.186	90,96

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	(%)
			(Rp.)	(Rp.)	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.640.300	144.273.622	15.366.678	90,37
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.432.300	54.742.345	3.689.955	93,69
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.000.000	57.447.160	552.840	99,05
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.838.000	5.127.978	4.710.022	52,12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.420.000	22.099.889	6.320.111	77,76
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.500.000	4.406.700	93.300	97,93
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	450.000	449.550	450	99,90

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	(%)
			(Rp.)	(Rp.)	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.401.700	329.615.785	9.785.915	97,12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.401.700	329.615.785	9.785.915	

2. Output kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Banten, terdiri atas:
  - a. Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor: 060/Kep.47-ORB/2023, tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor: 060/Kep.51-ORB/2023, tentang Standar Operasional Prosedur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  - c. Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor: 060/Kep.54-ORB/2023, tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Non ASN Pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  - d. Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Teladan Bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2023 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
  - e. Rekapitulasi Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pendidikan dalam Pendidikan dan Pelatihan T.A 2023 (Monitoring dan Evaluasi Keikutsertaan Diklat ASN di Lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi);

LAMPIRAN IV  
NOTA DINAS Plt. KEPALA BIRO  
ORGANISASI DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR : 800/26-ORB/2024  
TANGGAL: 18 Januari 2024

PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

1. Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Program Penataan Organisasi

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
II	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>2.163.824.000</b>	<b>1.856.405.241</b>	<b>307.418.759</b>	85,79
	<b>1 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>1.098.426.000</b>	<b>951.850.471</b>	<b>146.575.529</b>	86,66
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	363.868.000	314.734.524	49.133.476	86,50
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	300.000.000	267.517.795	32.482.205	89,17
	Penataan Analisis Jabatan	434.558.000	369.598.152	64.959.848	85,05

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran ( Rp)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
II	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>2.163.824.000</b>	<b>1.856.405.241</b>	<b>307.418.759</b>	85,79
	<b>2 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>1.065.398.000</b>	<b>904.554.770</b>	<b>160.843.230</b>	84,90
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	251.665.000	224.730.799	26.934.201	89,30
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	136.812.000	108.317.433	28.494.567	<b>79,17</b>
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	193.797.000	156.027.965	37.769.035	80,51
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	238.924.000	186.591.853	52.332.147	<b>78,10</b>
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	244.200.000	228.886.720	15.313.280	93,73



2. Capaian Kegiatan Program Penataan Organisasi ditinjau berdasarkan outputnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan terdiri atas:

NO.	RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH	HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
<b>Rancangan Peraturan Gubernur</b>			
1.	Sistem Kerja	Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja	Ditetapkan dan diundangkan
2.	Pembentukan SOTK Cabang Dinas dan UPTD	Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugaas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Ditetapkan dan diundangkan
3.	Anjab ABK Dinas	Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah	Berdasarkan Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, bahwa Anjab ABK agar disatukan menjadi satu Pergub
4.	Anjab ABK Badan		
5.	Anjab ABK SETDA		
6.	Anjab ABK SETWAN		
7.	Anjab ABK INSPEKTORAT		
8.	Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan	Draft/Rancangan Keputusan Gubernur Banten tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional dan Jabatan Lainnya ASN pada Perangkat Daerah	Sedang dimohonkan validasi kepada Kementerian PAN RB
9.	Standar Kompetensi Jabatan	Draft/Rancangan Keputusan Gubernur Banten tentang Standar Kompetensi Jabatan.	
10.	Pakaian Dinas	Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.	Ditetapkan dan diundangkan
11.	SOP Perangkat Daerah	SOP yang sudah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Gubernur: a. DPMPSTP; b. Pengadaan Barang dan Perijinan; SOP dalam proses Pendampingan: a. Satpol PP; b. Dinas Kominfo; c. Dinas Ketahanan Pangan; d. Dinas Pertanian; e. BKD; f. Disnaker.	SOP ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur untuk masing-masing/setiap Perangkat Daerah.
12.	Road Map RB 2023 - 2026	Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026	Ditetapkan dan diundangkan
13.	Tata Naskah Dinas	Draft Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.	Saran dan Rekomendasi dari Biro Hukum agar dijadikan satu Pergub
14.	Tata Naskah Dinas Elektronik		

<b>Rancangan Keputusan Kepala Daerah</b>			
1.	Proses Bisnis	Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.73-Huk/2023 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Banten.	Ditetapkan
2.	Rencana Aksi RB Tahun 2023	Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.195-Huk/2023 tentang Rencana Aksi RB Provinsi Banten Tahun 2023	Ditetapkan
3.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan	Keputusan Gubernur Banten Nomor 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan	Ditetapkan
4.	Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.	Keputusan Gubernur Banten Nomor 000.8.6/Kep.279-Huk/2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.	Ditetapkan

3. Selain Capaian Kegiatan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan baik pengaturan maupun penetapan, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi juga memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah berupa Fasilitasi Klinik RB meliputi:
  - a. Budaya Kerja;
  - b. Bidang Ketatalaksanaan  
(antara lain Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur, Tata Naskah Dinas, Kendaraan Dinas);
  - c. Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Antara Lain: Sistem Kerja, Anjab ABK, Standar Kompetensi Jabatan, Evaluasi Jabatan);
  - d. Pelayanan Publik;
  - e. Penilaian Reformasi Birokrasi; dan
  - f. Penilaian SAKIP.
4. Ikhtisar/Kesimpulan Hasil Kegiatan Program Penataan Organisasi

Capaian Kinerja berbasis Anggaran dalam skema DPA T.A 2023 telah menghasilkan beberapa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Kajian-Kajian, beberapa Hasil Fasilitasi (Rekomendasi, bidang pelayanan publik, internal Tata Kelola Pemerintahan seperti Pendampingan penyusunan SOP dan Proses Bisnis), dan beberapa pelaksanaan Kegiatan skala Provinsi seperti Budaya Kerja *Award*.

#### A. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- 1) Fasilitasi Kelembagaan Provinsi, memiliki output sebagai berikut:
  - a) Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja.
  - b) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c) Keputusan Gubernur Banten Nomor 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan, (Keputusan Gubernur Ini merupakan tindaklanjut dan amanat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023;

- d) Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 (Kajian ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, dimana Hasil Kajian Tim dari Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, memberikan penilaian terhadap Indeks Kelembagaan sebesar 85.6, sedangkan Target Tahun 2023 sebesar 41-60, dengan demikian IKU Biro Organisasi dan RB untuk Indeks Kelembagaan, **melebihi target yang sudah ditetapkan.**

2) Fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota

Terhadap Raperda Perangkat Daerah dan Raperkada SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Banten dalam kurun waktu anggaran 2023, sejumlah sebagai berikut:

- a) Untuk Rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN dari Kabupaten/Kota, sehingga tidak terdapat Rekomendasi dikeluarkan;
- b) Adapun Rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perwal/Perbup) tentang SOTK, terdapat 10 (sepuluh) Rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan 10 Permohonan Kab/Kota, dengan hasil Rekomendasi sebagai berikut:
- i. UPTD RSUD Benda pada Dinas Kesehatan Pemkot Tangerang direkomendasi Kelas D;
  - ii. UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon direkomendasi kelas B.
  - iii. UPTD RSUD Tigaraksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang direkomendasi Kelas C.
  - iv. Pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
  - v. Pembentukan UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
  - vi. pembentukan UPTD pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
  - vii. Perubahan SOTK pada Inspektorat Daerah Kota Tangerang.
  - viii. Perubahan Perwal Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang.
  - ix. Rekomendasi Penataan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
  - x. Rekomendasi Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Sistem Kerja.

3) Penataan analisis Jabatan

- a) Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.
- b) Draft/Rancangan Keputusan Gubernur Banten tentang Standar Kompetensi Jabatan, (saat ini draft tersebut sedang dimohonkan Validasi Standar Kompetensi Jabatan kepada Menteri PAN RB, melalui Surat Nomor: 800.1.1.4/4051-ORB/2023, tanggal 16 November 2023).

- c) Draft/Rancangan Keputusan Gubernur Banten tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional dan Jabatan Lainnya ASN pada Perangkat Daerah. (Saat ini sedang dimohonkan Validasi Kelas Jabatan kepada Menteri PAN RB, dengan Surat Nomor: 800.1.1.4/4052-ORB/2023, tertanggal 16 November 2023).

B. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - a) Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.
  - b) Keputusan Gubernur Banten Nomor 000.8.6/Kep.279-Huk/2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.
  - c) Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.195-Huk/2023 tentang Rencana Aksi RB Provinsi Banten Tahun 2023.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
  - a) Draft/Rancangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
  - b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Tahun 2023 (Surat Kementerian PAN RB Nomor: B/400/AA.05/2023, tanggal 27 November 2023, dimana Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 **Meningkat** dari Tahun 2022, sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,96
b. Pengukuran Kinerja	30	19,05	19,23
c. Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,24
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,30	15,31
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,20	67,74
Tingkat AKuntabilitas Kinerja		<b>B</b>	<b>B</b>

Namun demikian untuk Nilai Komponen Pelaporan SAKIP sebesar **10,24** pada Tahun 2023 menurun dan Target Untuk IKU Biro Organisasi **belum tercapai**, dimana Target berdasarkan IKU T.A 2023 adalah sebesar **10,77**.

- c) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 80,25 dengan Kategori A (memuaskan), sehingga IKU Biro Organisasi pada komponen Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Sekretariat Daaerah) **di atas Target**, dimana Target pada Tahun 2023 sebesar 70-80.

- 3) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
  - a) Keputusan Gubernur Banten Nomor 000.8.6.1/Kep.313-Huk/2023, tentang Penetapan Pemenang Budaya Kerja Award di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
  - b) Launching ASN BerAKHLAK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023.
- 4) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
  - a) Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
  - b) Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.73-Huk/2023 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Banten.
  - c) Draft Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
  - d) Draft Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- 5) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
  - a) Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang penilaiannya ditinjau berdasarkan:
    - i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023., dimana Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 telah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kemenpan RB terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melakukan fungsi Pelayanan Publik yaitu RSUD Banten, Bapenda, dan Dinas Sosial, dan diberikan hal penilaian dengan Indeks **rata-rata 3,74 kategori B (Baik)**.
    - ii. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 815 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023, dimana Kementerian PAN RB telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Banten Cq. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan RSUD Banten, dengan Kategori Penilaian terhadap 2 (dua) Perangkat Daerah tersebut yaitu **BAIK dan CUKUP**.
  - b) Laporan Kepatuhan Pelayanan Publik

Kepatuhan Pelayanan Publik merupakan kegiatan evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Provinsi Banten pada Tahun 2023 ini telah mendapat kategori Zona Hijau dan masuk 10 besar (urutan 7) secara nasional untuk tingkat Provinsi, dengan Perolehan Nilai Akhir dan Zona sebesar 91.16 (dengan demikian Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada “Kepatuhan Pelayanan Publik” **di atas Target 81,81**).

c) Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, angka dari hasil analisis yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan gambaran/potret layanan yang diselenggarakan oleh Provinsi Banten dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan, pada tahun 2023 ini nilai IKM Provinsi Banten adalah 88,43 atau setara dengan 3,53 dengan nilai tertinggi diperoleh Dinas Koperasi dan UMKM( 90,86), Bapenda (90,78) BPKAD (90,73).

Laporan ini telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada Menteri PAN RB dengan Surat Nomor: 000.0.1.1/3629-ORB/2023, tanggal 25 Oktober 2023 perihal Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Banten Tahun 2023.

d) Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh pemahaman hingga Solusi antara penyelenggara pelayanan dan Masyarakat, antara lain: berkaitan dengan pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, Forum Konsultasi Publik pada tahun 2023 telah diselenggarakan oleh RSUD Banten dan DPMPTSP. Adapun hasil Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

i. RSUD Banten

- ⇒ Perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan;
- ⇒ Masyarakat pengguna layanan pada RSUD Banten perlu diberikan ruang untuk menyampaikan masukan terkait penyelenggaraan pelayanan dengan menyelenggarakan forum konsultasi publik berdasarkan isu yang berkembang;
- ⇒ Perlu sosialisasi baik online maupun offline atas standar pelayanan yang telah ditetapkan.

ii. DPMPTSP

- ⇒ Perlu menyampaikan surat kepada Balai konservasi air tanah geologi Kementerian ESDM perihal peninjauan kemudahan persyarakat dan tahapan penyelenggaraan perizinan SIPA di daerah dan menyampaikan saran masukan pada kesempatan rapat kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM;
- ⇒ Berkoordinasi Bersama Dinas ESDM Provinsi Banten ke Balai Konservasi Air Tanah Badan Geologi Kementerian ESDM atas penyediaan informasi zona imbuhan atau kritis.

e) Laporan Analisis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi Banten 2023

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Provinsi Banten kemudian hasilnya dilakukan rekapitulasi oleh Biro Organisasi dan RB sehingga diketahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan analisis terhadap indikator-indikator dalam perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan kegiatan penyusunan analisis terhadap pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengetahui/mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik dan mengetahui solusi serta langkah-langkah yang harus dilakukan kedepan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten, dari hasil analisis terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh hasil IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang mengalami peningkatan atau trend yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan rincian, tahun 2020 (81,78), tahun 2021 (86,25), tahun 2022 (87,76), tahun 2023 (88,43).

LAMPIRAN V  
NOTA DINAS Plt. KEPALA BIRO  
ORGANISASI DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR : 800/26-ORB/2024  
TANGGAL: 18 Januari 2024

## MASALAH DAN KENDALA

Untuk Kendala pada Capaian Output Kegiatan pada Program Penataan Organisasi adalah rancangan peraturan gubernur tentang evaluasi jabatan dan rancangan peraturan gubernur tentang standar kompetensi jabatan belum bisa diundangkan dikarenakan menunggu hasil validasi dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. sampai saat ini rekomendasi hasil validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hal tersebut belum keluar.

Adapun yang menjadi kendala untuk realisasi Anggaran utamanya adalah:

- a. mekanisme revolving uang persediaan memerlukan proses yang agak lama. karena pada saat revolving persediaan harus menunggu minimal 50 % dari masing masing biro, berakibat pada daya serap realisasi keuangan agak terhambat.
- b. serapan keuangan hanya 87,60 % karena adanya efisiensi dari penyerapan belanja perjalanan dinas, belanja barang pakai habis (atk), belanja mamin rapat dan kegiatan, honorarium narasumber internal yang hanya dibayar 50 %, dan penerapan implementasi perpres 33 tahun 2020 yang diperkuat Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pembatasan Honor Tim Terkoordinasi.

Secara lebih rinci untuk setiap sub kegiatan dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi tidak mencapai target belanja ( $\leq 90\%$ ) sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi sebesar Rp.1.594.000,- (53,49%) dari anggaran sebesar Rp.2.980.000,-. Terdapat efisiensi anggaran pada rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber eselon III berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas dan pada rekening belanja lembur yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
2. Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 85.071.814,- (89,48%) dari Rp. 95.076.000,-. Terdapat efisiensi anggaran pada rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber eselon III berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium Narasumber/pembahas namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi sebesar Rp. 5.127.978,- (52,12%) dari anggaran Rp. 9.838.000,-. Terdapat efisiensi anggaran pada rekening alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor yang belum terlaksana.



4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar Rp. 22.099.889,- (77,76%) dari Rp. 28.420.000,-. Terdapat efisiensi anggaran pada rekening perjalanan dinas biasa namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
5. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi dengan realisasi Rp. 314.734.524,- (86,50%) dari Rp. 363.868.000,-. Terdapat efisiensi anggaran pada rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber eselon III berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas dan adanya efisiensi pada rekening belanja perjalanan dinas biasa, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
6. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan realisasi Rp. 267.517.795,- (89,17%) dari Rp. 300.000.000,-. Terdapat efisiensi pada rekening belanja alat tulis kantor dan honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
7. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan dengan realisasi Rp. 369.598.152,- (85,05%) dari Rp. 434.558.000,-. Terdapat efisiensi pada rekening belanja alat tulis kantor, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas, terdapat efisiensi pada rekening honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dikarenakan terbentur Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian Tahun Anggaran 2023 pada Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dari lintas satuan kerja. Efisiensi pada rekening perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas biasa, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
8. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan realisasi Rp. 224.730.799,- (89,30%) dari Rp. 251.665.000,-. Terdapat efisiensi pada rekening honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dikarenakan terbentur Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian Tahun Anggaran 2023 pada Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dari lintas satuan kerja, dan efisiensi dari rekening perjalanan dinas biasa, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
9. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan realisasi Rp. 108.317.433,- (79,17%) dari Rp. 136.812.000,-. Terdapat efisiensi anggaran pada rekening alat tulis kantor karena perbedaan harga di belanda, efisiensi anggaran pada rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas. Efisiensi Anggaran juga terdapat pada kode rekening belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota paket meeting dimana peserta kabupaten/kota yang hadir

tidak sesuai perencanaan, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.

10. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dengan realisasi Rp. 156.027.965,- (80,51%) dari Rp. 193.797.000,-. Terdapat efisiensi pada rekening alat tulis kantor, rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium narasumber/pembahas serta efisiensi pada rekening perjalanan dinas dalam kota dan rekening perjalanan dinas biasa, namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan realisasi Rp. 186.591.853,- (78,10%) dari Rp. 238.924.000,-. Terdapat efisiensi pada rekening honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia karena narasumber berasal dari SKPD/Biro penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium Narasumber/pembahas serta Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dikarenakan terbentur Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian Tahun Anggaran 2023 pada Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dari lintas satuan kerja namun secara umum capaian kinerja telah tercapai sepenuhnya.